

# Daftar Isi

<b>Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia</b>	<b>v</b>
<b>Sambutan Ketua Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Indonesia</b>	<b>vii</b>
<b>Prakata</b>	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar Penerbit</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>xiii</b>
<b>BAGIAN I: PENDAHULUAN</b>	
<b>Bab I Konvergensi Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan</b>	<b>3</b>
Pendahuluan	4
Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia	5
Konvergensi IFRS	6
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)	7
Laporan Keuangan Berdasar PSAK	9
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	10



Laporan Keuangan Berdasar SAK ETAP	12
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah	14
Pajak Penghasilan	14
Transaksi dalam Mata Uang Asing	14
Mata Uang Pencatatan dan Pelaporan dalam SAK ETAP	15
Undang-Undang Perpajakan	16

## **Bab 2 Kewajiban Pembukuan 19**

Pendahuluan	20
Kewajiban Pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan	20
Kewajiban Pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	22
Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia	23
Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan	24
Mata Uang Pembukuan atau Pencatatan dan Konvergensi IFRS	26
Pengecualian dan Sanksi dari Kewajiban Pembukuan	26
Penyelenggaraan Pembukuan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah	27
Penyelenggaraan Pembukuan dengan Satuan Mata Uang Asing	28
Persyaratan Administratif dalam Pembukuan dengan Bahasa dan Mata Uang Asing	29
Kewajiban Perpajakan	30
Konversi Satuan Mata Uang Dolar	30
Kerahasiaan Pembukuan	31
Pembukuan dengan Komputer	32

## **Bab 3 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak 33**

Pendahuluan	34
<i>Bidang dalam Ruang Lingkup Akuntansi</i>	34
Sejarah Perkembangan Akuntansi Indonesia	35
Teori Akuntansi	36
Sejarah Perkembangan Perpajakan Indonesia	37
Prinsip Dasar Akuntansi Pajak	40
Hubungan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pajak	42
Hubungan Istimewa dan Penilaian Kewajaran dalam Transaksi	43
Penilaian Kewajaran dalam Transaksi	47

## **Bab 4 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 51**

Pendahuluan	52
Laporan Keuangan Komersial	52
Laporan Keuangan Fiskal	52
Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	54
Asumsi Dasar Akuntansi	54
Konsep Dasar Entitas	55



	Penyusunan Laporan Keuangan	56
	Pengidentifikasian dan Pengukuran Data	57
	Pemrosesan	57
	Laporan Keuangan	57
	Analisis dan Interpretasi Laporan Keuangan	58
	Persamaan Akuntansi	58
	Penggunaan Akun	61
	Pengelompokan Akun	63
	Jurnal	64
	Buku Besar (Ledger)	64
	Kertas Kerja (Worksheets) Penyusunan Laporan Keuangan	65
<b>BAGIAN 2: NERACA/LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		<b>69</b>
<b>Bab 5</b>	<b>Akuntansi Kas dan Bank</b>	<b>71</b>
	Pendahuluan	72
	Akuntansi Kas/Pengendalian Kas	72
	Pengelolaan dan Sistem Pencatatan Kas Kecil	73
	<i>Imprest Method</i>	73
	<i>Fluctuation Method</i>	74
	Rekonsiliasi Bank	75
	Akuntansi Pajak	78
<b>Bab 6</b>	<b>Akuntansi Piutang</b>	<b>81</b>
	Pengertian Piutang	82
	Penyajian dalam Laporan Keuangan	82
	Akuntansi atas Piutang	82
	Metode Penghapusan Piutang	83
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	83
	Pembebanan Biaya Piutang Tidak Tertagih	85
	Penghapusan Piutang	86
	Akuntansi Pajak	86
	Pembentukan Cadangan Piutang Tidak Tertagih Usaha Bank	89
<b>Bab 7</b>	<b>Akuntansi Persediaan</b>	<b>91</b>
	Pengertian Persediaan	92
	Pengukuran Persediaan	93
	Pengakuan sebagai Beban	94
	Pencatatan Persediaan	94
	Penetapan Persediaan dan Pelaporan dalam Laporan Keuangan	95
	Metode Penilaian Persediaan	97
	Metode Penilaian Lainnya	101
	<i>Akuntansi Pajak</i>	102



<b>Bab 8</b>	<b>Akuntansi Aset Tetap Berwujud</b>	<b>107</b>
	Pendahuluan	108
	Pengakuan Aset Tetap	108
	Pengukuran Biaya Perolehan	110
	Perolehan Aset Tetap	111
	<i>Perolehan Aset Tetap secara Gabungan</i>	111
	<i>Perolehan Aset Tetap secara Angsuran</i>	112
	<i>Perolehan Aset Tetap secara Pertukaran</i>	113
	<i>Perolehan Aset Tetap dengan Cara Membangun Sendiri</i>	116
	<i>Perolehan secara Hibah, Bantuan, dan Sumbangan</i>	116
	Aset Tetap yang Dihilangkan	118
	Penyusutan Aset Tetap	120
	Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Komersial	122
	Saat Penyusutan Aset Tetap Sesuai Ketentuan Komersial	128
	Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Jual Beli Harta	129
	Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi	
	Tukar-Menukar Harta	129
	<i>Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan</i>	
	<i>Harta karena Hibah, Bantuan atau Sumbangan, dan Warisan</i>	132
	<i>Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta</i>	
	<i>Termasuk Setoran Tunai yang Diterima oleh Badan sebagai</i>	
	<i>Pengganti Penyertaan Modal</i>	133
	Harga Perolehan Aset Membangun Sendiri	133
	Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan	134
	<i>Kelompok Harta Berwujud dan Tarif Penyusutan</i>	134
	Penyusutan pada Akhir Masa Manfaat	139
	Saat Penyusutan Aset Tetap	139
	Penarikan Harta Bukan Bangunan	140
	Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan atas	
	Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler	141
	<i>Jenis Harta yang Disusutkan dan Pengelompokannya</i>	141
	<i>Tata Cara Penghitungan Penyusutan Fiskal</i>	141
	Penghitungan Penyusutan atas Komputer, Printer, Scanner, dan Sejenisnya	142
	Penghitungan Penyusutan atas Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan	142
	Ketentuan Lain	143
<b>Bab 9</b>	<b>Kombinasi Bisnis</b>	<b>145</b>
	Pendahuluan	146
	Tujuan, Lingkup, dan Identifikasi Bisnis	146
	Metode Akuisisi	148
	Akuntansi Pajak Penghasilan atas Kombinasi Bisnis	148
	<i>Penggunaan Harga Pasar</i>	150
	<i>Penggunaan Nilai Buku</i>	151



<b>Bab 10</b>	<b>Revaluasi Aset Tetap</b>	<b>155</b>
	Pendahuluan	156
	Revaluasi Aset Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (Revisi 2011)	156
	Revaluasi Aset Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan	156
	Wajib Pajak yang Dapat Mengajukan Revaluasi Aset Tetap	158
	Aset Tetap yang Dapat Dinilai Kembali	158
	Nilai Pasar atau Nilai Wajar	158
	Penghitungan Pajak Penghasilan atas Selisih Penilaian Kembali	159
	Permohonan Penilaian Kembali	160
	Dasar Penyusutan Aset Tetap	161
	Batas Waktu Pembayaran	161
	Wajib Pajak Melakukan Pengalihan	162
	Penyesuaian Aturan dalam Penilaian Kembali Aset Tetap	162
	Tata Cara Pengajuan Permohonan	163
	Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tertentu	164
	Aset yang Diajukan Permohonan	165
	Akuntansi Penilaian Kembali Aset Tetap	166
	Tarif Pajak Penghasilan atas Penilaian Kembali Aset Tetap	167
	Dasar Penyusutan dalam Hal Dilakukan Penilaian Kembali Aset Tetap	167
	Pengenaan Tambahan Pajak Penghasilan	168
	Wajib Pajak Kategori Perlakuan Khusus	169
	Ketentuan Penilaian Kembali bagi BUMN/BUMD	169
<b>Bab 11</b>	<b>Akuntansi Aset Takberwujud</b>	<b>171</b>
	Pendahuluan	172
	Penggolongan Aset Takberwujud dan Perlakuan Akuntansinya	172
	Termasuk Pengertian Aset Takberwujud	174
	<i>Hak Paten</i>	174
	<i>Hak Cipta</i>	174
	<i>Merek Dagang</i>	174
	<i>Waralaba</i>	175
	<i>Leasehold</i>	175
	<i>Goodwill</i>	175
	<i>Biaya yang Ditangguhkan</i>	177
	Deplesi	177
	Amortisasi	178
	Amortisasi dalam Akuntansi Pajak	179
	Periode dan Metode Amortisasi	180
	<i>Pengelompokan Aset Takberwujud dan Tarif Amortisasi</i>	181
	Saat Amortisasi dan Amortisasi pada Akhir Masa Manfaat	182
	<i>Ketentuan Khusus</i>	182
	Pengalihan Hak Aset Takberwujud	183
	Identifikasi Kegiatan Riset dan Pengembangan	184



<b>Bab 8</b>	Pengukuran	186	
	Saat Amortisasi	187	
	Akuntansi Pajak Biaya Penelitian dan Pengembangan	187	
<b>Bab 12</b>	<b>Liabilitas</b>	<b>189</b>	
	Pendahuluan	190	
	Klasifikasi Liabilitas	190	
	Utang Dagang Akuntansi Komersial	191	
	Utang Dagang dengan Jaminan (Warranty Liability)	192	
	Wesel Bayar	193	
	Utang Dividen	194	
	Biaya yang Masih Harus Dibayar	194	
	Utang Pajak	195	
	Utang Lainnya	195	
	Utang dalam Mata Uang Asing	195	
	Utang Bunga Pinjaman	195	
	Perbandingan Utang dan Modal	195	
<b>Bab 13</b>	<b>Akuntansi Investasi Jangka Pendek dan Jangka Panjang</b>	<b>197</b>	
	Pendahuluan	198	
	Investasi Saham	199	
	Investasi Bentuk Obligasi	201	
	Akuntansi Pajak	202	
<b>Bab 14</b>	<b>Ekuitas</b>	<b>205</b>	
	Pendahuluan	206	
	Bentuk Hukum dan Ekuitas	206	
	Ekuitas Saham	207	
<b>Bab 15</b>	<b>Akuntansi Mata Uang Asing</b>	<b>211</b>	
	Pendahuluan	212	
	Penyajian dalam Laporan Keuangan	212	
	Akuntansi Kerugian Selisih Kurs Mata Uang Asing	214	
<b>BAGIAN 3: DAFTAR PERHITUNGAN LABA RUGI 219</b>			
<b>Bab 16</b>	<b>Akuntansi Pajak Penghasilan</b>	<b>221</b>	
	Pendahuluan	222	
	Penghasilan sebagai Objek Pajak Penghasilan	222	
	<i>Penghasilan Tertentu</i>	227	
	<i>Bukan Objek Pajak Penghasilan</i>	228	
	<i>Penghasilan Tidak Kena Pajak</i>	233	
	Tarif Pajak	234	
	<i>Besarnya Tarif Pajak Penghasilan</i>	234	



<i>Aturan Khusus Penerapan Tarif Wajib Pajak Badan</i>	235
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak	236
Penghitungan Pajak Terutang	237
Penggabungan Penghasilan Orang Pribadi	237
Pemisahan Penghasilan Orang Pribadi	238
<i>Penghasilan Anak yang Belum Dewasa</i>	239
Pemajakan atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Aspek Akuntansinya	239
Tata Cara Pengenaan PPh bagi UMKM	240
Pajak Penghasilan Pasal 21	241
<i>Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21</i>	242
Pajak Penghasilan Pasal 22	245
<i>Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 22</i>	247
<i>Tarif Pajak bagi Wajib Pajak yang Tidak Ber-NPWP</i>	248
<i>Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22</i>	248
Pajak Penghasilan Pasal 23	249
<i>Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	249
<i>Tarif Pemotongan bagi Wajib Pajak yang Tidak Ber-NPWP</i>	250
<i>Pengecualian dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	250
<i>Pemotong dan Saat Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	250
<i>Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23</i>	251
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24	251
Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri	252
Pengkreditan dan Penentuan Sumber Penghasilan	252
Tata Cara Pengkreditan	253
Penggabungan Penghasilan	254
<i>Saat Penggabungan Penghasilan</i>	254
<i>Tata Cara Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri</i>	254
Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Badan	256
Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri Wajib Pajak Orang Pribadi	257
Kerugian di dalam Negeri	257
Penghasilan Wajib Pajak Dikenakan Pajak Bersifat Final	258
Pengurangan/Pengembalian Kredit Pajak Luar Negeri	259
Perubahan Besarnya Penghasilan Luar Negeri	259
Pajak Penghasilan Pasal 25	261
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25	263
Pajak Penghasilan Pasal 26	264
<i>Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 26</i>	264
Akuntansi Pajak atas Pajak Penghasilan yang Pengenaannya Bersifat Final (PPh Pasal 4 Ayat 2)	265
<i>Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berpenghasilan Rendah</i>	266
<i>Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan</i>	266
Beberapa Jenis Penghasilan yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final	267



	<i>Hadiah Undian</i>	270	
	<i>Persewaan Tanah dan/atau Bangunan</i>	270	
	<i>Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi</i>	271	
Bab 12	<i>Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan Kepada Anggota Koperasi</i>	271	
<b>Bab 17</b>	<b>Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK 46</b>	<b>273</b>	
	Pendahuluan	274	
	Akuntansi Pajak Penghasilan Berbasis PSAK 46	274	
	Perbedaan Temporer	277	
	Perbedaan Tetap	277	
	Beban Pajak Penghasilan	277	
	Pajak Kini dan Pajak Tanggahan	278	
	Penyajian dalam Laporan Keuangan	282	
<b>Bab 18</b>	<b>Klasifikasi Biaya dan Kompensasi Kerugian</b>	<b>283</b>	
	Pendahuluan	284	
	Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan	284	
	Biaya yang Tidak Boleh Dibebankan	288	
	Klasifikasi Biaya Sesuai Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan	291	
	Kompensasi Kerugian	293	
	<i>Akuntansi Perpajakan</i>	294	
	Kompensasi Kerugian dalam Rangka Pengampunan Pajak	295	
<b>Bab 19</b>	<b>Rekonsiliasi Laporan Keuangan</b>	<b>297</b>	
	Pendahuluan	298	
	Bentuk Rekonsiliasi	300	
<b>Bab 20</b>	<b>Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah</b>	<b>305</b>	
	Pendahuluan	306	
	Objek Pajak	306	
	<i>Objek Pajak Pertambahan Nilai</i>	306	
	<i>Barang Kena Pajak</i>	308	
	<i>Jasa Kena Pajak</i>	308	
	Penyerahan Barang Kena Pajak	309	
	<i>Tidak Termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak</i>	311	
	Penyerahan Jasa Kena Pajak	311	
	<i>Jasa Kustodian</i>	312	
	<i>Jasa Consumer Credit, Credit Card, dan Debit Card</i>	312	
	<i>Jasa Penagihan Listrik dan Telepon oleh Bank</i>	312	
	<i>Jasa Angkutan dan Jasa Ekspedisi Muatan</i>	312	



Pajak Penjualan atas Barang Mewah	313
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah	313
Tarif Pajak	313
<i>Tarif Pajak Pertambahan Nilai</i>	313
<i>Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah</i>	314
Dasar Pengenaan Pajak	314
<i>Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak</i>	315
<i>Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi PKP Pedagang Eceran</i>	316
<i>Nilai Penyerahan yang Menggunakan Valuta Asing</i>	316
Cara Menghitung Pajak	317
<i>Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai</i>	317
<i>PPN atau PPnBM menjadi Bagian dari Harga</i>	317
<i>Penghitungan PPN dan PPnBM dalam Satu Transaksi</i>	318
<i>Pemungut Pajak Pertambahan Nilai</i>	318
Faktur Pajak	319
<i>Kelompok Faktur Pajak</i>	320
Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak	322
Pembuatan Faktur Pajak Pengganti, Salinan Arsip Faktur Pajak, dan Pembatalan Faktur Pajak	323
Persyaratan Formal Dokumen Tertentu	324
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	325
Saat Pembuatan Faktur Pajak	325
Pengembalian Barang Kena Pajak (Retur)	326
Pembatalan Jasa Kena Pajak	326
Larangan dan Sanksi dalam Pembuatan Faktur Pajak	326
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	327
<i>Pengkreditan Pajak Masukan</i>	327
<i>Tempat Pengkreditan Pajak Masukan</i>	328
<i>Kelebihan Pajak Masukan</i>	329
Pajak Masukan dalam Hal PKP Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak	329
Pengusaha yang Menghitung Penghasilan Neto dengan Norma Penghitungan Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan	332
Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak Berikutnya	333
Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan	334
Akuntansi Pajak	335
<b>BAGIAN 4: AKUNTANSI PAJAK USAHA TERTENTU</b>	<b>339</b>
<b>Bab 21 Akuntansi Sewa</b>	<b>341</b>
Pendahuluan	342
Istilah yang Digunakan dalam PSAK 73	343
Klasifikasi Sewa	344



Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan	382
Laporan Hasil Pemeriksaan	383
Kebijakan Pemeriksaan dan Compliance Risk Management (CRM)	384
Tujuan Kebijakan Pemeriksaan	385
Revitalisasi Proses Bisnis Pemeriksaan	385
Pelaksanaan Proses Bisnis Pemeriksaan	386
<i>Penyusunan Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas</i>	
<i>Penggalian Potensi (DSP3)</i>	387
<i>Penentuan Wajib Pajak sebagai Populasi DSP3</i>	387
Indikasi Modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak	389
<i>Bentuk Modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak</i>	389
Identifikasi Potensi Pajak	390
Identifikasi Kemampuan Membayar	391
Perencanaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	391
Percepatan Restitusi PPN	392
Compliance Risk Management (CRM)	392
<i>Sasaran Compliance Risk Management</i>	392
<i>Implementasi CRM Fungsi Ekstensifikasi</i>	393
<i>Implementasi CRM Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Wajib Pajak</i>	394
<i>Implementasi CRM Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa</i>	395

## **Bab 25 Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 397**

Pendahuluan	398
Pengamatan	398
Pemeriksaan Bukti Permulaan	399
<i>Dasar Pemeriksaan Bukti Permulaan</i>	401
<i>Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan</i>	401
<i>Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan</i>	402
Penyidikan	402
<i>Tindak Pidana</i>	403
<i>Tersangka</i>	404
Pelaku Tindak Pidana	404
Wewenang Penyidik Pajak	405

<b>Soal dan Pembahasan Akuntansi Pajak</b>	<b>S-1</b>
<b>Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak</b>	<b>S-23</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>D-1</b>
<b>Indeks</b>	<b>I-1</b>



	<i>Dari Segi Lessor</i>	345
	<i>Dari Segi Lessee</i>	346
	Pelaksanaan Transaksi Sewa	346
	Keuntungan dan Kerugian Sewa	346
	Praktik Akuntansi Sewa	347
	Akuntansi Pajak atas Sewa	348
	Penyerahan Jasa dalam Kategori Sewa	351
<b>Bab 22</b>	<b>Akuntansi Kontrak Konstruksi</b>	<b>353</b>
	Pendahuluan	354
	Akuntansi Kontrak Konstruksi	354
	Penggunaan Metode Persentase Penyelesaian	356
	Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	356
	Objek Pajak Usaha Jasa Konstruksi	359
	Tarif Pajak Penghasilan untuk Usaha Jasa Konstruksi	359
	Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran	360
	Lingkup Pekerjaan Lainnya dan Aturan Peralihan Hubungan	
	Kebesaran Tidak Standar	360
<b>Bab 23</b>	<b>Akuntansi Murabahah (Transaksi Berbasis Syariah)</b>	<b>363</b>
	Pendahuluan	364
	Mekanisme dalam Murabahah	364
	Implementasi Perhitungan dan Akuntansi Transaksi Murabahah	365
	Akuntansi Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah	367
	Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Berbasis Syariah	368
	Transaksi Murabahah dan Aspek Perpajakannya	368
	<b>BAGIAN 5: PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK</b>	<b>369</b>
<b>Bab 24</b>	<b>Pemeriksaan Pajak</b>	<b>371</b>
	Pendahuluan	372
	Pemeriksaan Pajak	372
	Beberapa Istilah dalam Pemeriksaan Pajak	373
	Tujuan Pemeriksaan Pajak	375
	Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak	375
	Jangka Waktu Pemeriksaan	376
	Standar Pemeriksaan	377
	Kertas Kerja Pemeriksa Pajak	378
	Kewajiban Pemeriksa Pajak	379
	<i>Pemeriksaan Lapangan</i>	379
	<i>Pemeriksaan Kantor</i>	380
	Tahapan Pemeriksaan	380
	Teknik Pemeriksaan	381
	Metode Pemeriksaan	381